

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya memajukan ekonomi di tingkat lokal sejatinya memiliki muara pada terwujudnya kemakmuran warga. Hal ini dicapai lewat perbaikan standar kehidupan, akselerasi ekonomi, serta penyediaan ruang bagi angkatan kerja. Akses terhadap mata pencaharian memegang peranan esensial karena berfungsi sebagai tulang punggung finansial keluarga sekaligus katalisator mobilitas sosial. Atas dasar tersebut, parameter kesuksesan sebuah program pembangunan tidak boleh hanya terpaku pada tingginya angka pertumbuhan, melainkan harus dinilai dari seberapa besar daya serap kawasan itu terhadap para pencari kerja. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan International Labour Organization. (2023), yang menggarisbawahi bahwa ketersediaan pekerjaan yang layak dan bernilai tambah adalah pilar utama terwujudnya ekonomi inklusif guna mengikis kemiskinan dan mengangkat derajat publik.

Ketimpangan karakteristik pengangguran antarwilayah pada dasarnya merupakan implikasi dari berbedanya kapasitas setiap daerah dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Merujuk pada pandangan Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020), divergensi daya serap ini sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti laju pertumbuhan ekonomi, aliran investasi, mutu sumber daya manusia, serta formasi struktur ekonomi lokal. Saat perekonomian suatu daerah gagal menyerap tenaga kerjanya secara maksimal akibat kendala pada faktor-faktor tersebut, dampaknya akan langsung terefleksi pada melonjaknya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Oleh karena itu, TPT kerap dijadikan instrumen krusial untuk mengevaluasi seberapa sehat kondisi pasar tenaga kerja di suatu kawasan.

Hambatan ketenagakerjaan, khususnya tingginya angka pengangguran, masih menjadi pekerjaan rumah yang esensial dalam pembangunan di Indonesia. Fase pemulihan yang terjadi pasca-kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membuktikan bahwa perbaikan indikator makro tidak secara

otomatis mereduksi jumlah penganggur secara simetris di seluruh penjuru negeri. Kesenjangan ini menyoroti sebuah realitas bahwa tren pertumbuhan yang positif belum tentu berbanding lurus dengan tingginya daya serap tenaga kerja, mengingat kapasitas tersebut sangat terikat pada fondasi dan struktur ekonomi lokal yang saling berbeda.

Sebagai kawasan strategis dengan kontribusi makroekonomi yang masif di Indonesia, konstelasi pembangunan di Pulau Sumatra tidaklah seragam. Tingkat pengangguran yang heterogen di masing-masing provinsi dipicu oleh sejumlah variabel pembentuk, di antaranya ketimpangan fondasi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, arus investasi yang masuk, serta kebijakan penetapan upah minimum. Beranjak dari kondisi tersebut, komparasi antarwilayah provinsi di Sumatra diperlukan untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kedudukan Provinsi Kepulauan Riau relatif terhadap entitas administratif di sekitarnya.

Tabel 1.1 memaparkan sebuah fenomena kontradiktif pada tahun 2024, di mana Provinsi Kepulauan Riau memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling tinggi di kawasan Sumatra, yakni 6,39 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan fundamental ekonominya yang tergolong kuat, ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, dan realisasi investasi yang sangat kompetitif di tingkat regional. Temuan ini menyiratkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi, maupun tingginya investasi belum dapat menjadi garansi bagi minimnya angka pengangguran. Dengan kata lain, keterkaitan antara variabel-variabel tersebut dengan pergerakan TPT di wilayah ini tidak merefleksikan asumsi dasar dalam literatur ekonomi.

Keberhasilan suatu daerah dalam membangun perekonomiannya sejatinya diukur dari daya serap tenaga kerja, bukan sekadar dari tingginya angka pertumbuhan maupun masifnya penanaman modal. Konteks ini sangat relevan untuk menggambarkan situasi di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun wilayah ini memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari provinsi-provinsi lain di Sumatra seperti posisi strategis di rute perdagangan dunia, status kawasan

perdagangan bebas (FTZ), dan basis industri pengolahan yang dominan keunggulan tersebut nyatanya belum mampu mengentaskan persoalan pengangguran secara optimal. Tren pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh besarnya minat investor di provinsi ini rupanya belum berbanding lurus dengan penciptaan kesempatan kerja yang memadai.

Tabel 1.1 Kondisi TPT, IPM, Pertumbuhan PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2024

No	Provinsi	TPT (%)	IPM (poin)	Pertumbuhan PDRB (%)	Investasi (Juta Rp)	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
1.	Kepulauan Riau	6,39	79,89	5,02	47.261.820	3.460.672
2.	Sumatera Barat	5,75	76,43	4,36	9.694.258	2.809.915
3.	Aceh	5,75	75,36	4,66	9.467.794	2.811.449
4.	Sumatera Utara	5,60	75,76	5,03	48.271.707	3.294.626
5.	Kep. Bangka Belitung	4,63	74,55	0,77	17.259.376	3.037.122
6.	Jambi	4,48	74,36	4,51	11.570.720	3.456.874
7.	Lampung	4,19	73,13	4,57	9.660.904	2.507.079
8.	Sumatera Selatan	3,86	73,84	5,03	70.920.369	2.716.497
9.	Riau	3,70	75,67	3,52	88.297.722	3.640.000
10.	Bengkulu	3,11	74,91	4,62	9.283.502	3.402.492

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2024

Berpijak pada anomali tersebut, Kepulauan Riau menawarkan ruang kajian yang sangat relevan karena memperlihatkan penyimpangan dari postulat dasar teori

ekonomi. Dinamika perekonomian yang masif ditopang oleh tingginya realisasi investasi, mutu sumber daya manusia, serta laju pertumbuhan ekonomi kenyataannya tidak serta-merta berimbas pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Guna mengurai kompleksitas fenomena ini, observasi empiris yang lebih mendalam pada skala kabupaten/kota mutlak dilakukan. Analisis tersebut ditujukan untuk menguji secara komprehensif sejauh mana implikasi dari Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan kebijakan Upah Minimum dalam memengaruhi fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau.

Problematika pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya tergambar pada agregat makro tingkat provinsi, melainkan juga merefleksikan disparitas yang signifikan antar-kabupaten dan kota. Sepanjang periode pengamatan 2020-2024, setiap wilayah administratif menampilkan profil pembangunan yang heterogen, terutama dalam aspek mutu sumber daya manusia, laju perekonomian, realisasi penanaman modal, hingga kebijakan upah minimum. Ketimpangan karakteristik fundamental tersebut secara langsung mendiferensiasi kapasitas masing-masing daerah dalam memfasilitasi penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, rasio Tingkat Pengangguran Terbuka yang terbentuk di setiap wilayah menunjukkan rentang variasi yang sangat kentara.

Paradoks ketenagakerjaan tampak jelas di Kota Batam yang berstatus sebagai episentrum industri, niaga, dan investasi di Kepulauan Riau; di mana wilayah ini justru membukukan angka Tingkat Pengangguran Terbuka yang lebih dominan ketimbang kawasan sekitarnya. Fenomena kontradiktif ini semakin terlihat ketika dikomparasikan dengan entitas berskala ekonomi lebih moderat seperti Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas, yang secara mengejutkan justru mampu menjaga rasio pengangguran di level yang lebih rendah. Fakta empiris ini mematahkan asumsi bahwa besarnya volume aktivitas ekonomi akan secara otomatis memaksimalkan daya serap tenaga kerja. Sebaliknya, anomali tersebut mempertegas tingginya heterogenitas pada fundamental struktur perekonomian, sekaligus menunjukkan ketimpangan kapasitas pasar kerja yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disinyalir sebagai salah satu determinan krusial yang memengaruhi pergerakan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dalam kerangka teoretis, perbaikan mutu modal manusia yang direpresentasikan oleh dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar kelayakan hidup diasumsikan akan mendongkrak produktivitas serta daya saing angkatan kerja, yang pada gilirannya memperbesar probabilitas terserap di pasar kerja. Kendati demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak selalu berkorelasi negatif terhadap angka pengangguran, terutama jika ekspansi lapangan pekerjaan gagal mengimbangi laju perbaikan mutu tenaga kerja tersebut. Situasi disproportional ini berpotensi memicu ketidakselarasan kualifikasi (*mismatch*) antara kompetensi yang ditawarkan oleh pencari kerja dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh sektor industri, sehingga pada akhirnya menyisakan angkatan kerja yang tidak terakomodasi secara optimal.

Di samping IPM, variabel makro lain yang diestimasi memengaruhi pergerakan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan postulat ekonomi, akselerasi laju pertumbuhan mengindikasikan adanya eskalasi aktivitas produksi yang seyogianya bermuara pada perluasan kesempatan kerja. Meskipun demikian, asumsi linear tersebut rupanya tidak selalu terkonfirmasi di Provinsi Kepulauan Riau. Kemajuan ekonomi yang ditopang oleh sektor industri modern berspesifikasi teknologi tinggi cenderung berpusat pada padat modal, sehingga mampu melipatgandakan *output* tanpa dibarengi oleh daya serap tenaga kerja yang sepadan. Anomali struktural semacam ini lazim diidentifikasi sebagai *jobless growth*, yakni sebuah kondisi di mana ekspansi perekonomian yang positif gagal memberikan dampak substansial terhadap reduksi angka pengangguran.

Variabel determinan selanjutnya yang patut disoroti adalah investasi. Dalam tinjauan teoretis, penanaman modal berfungsi sebagai katalisator untuk mendongkrak kapasitas produksi, mengekspansi skala ekonomi, sekaligus membuka ruang pekerjaan baru. Walaupun begitu, efektivitas aliran modal dalam menyerap angkatan kerja sangat dikondisikan oleh corak atau orientasi dari investasi tersebut. Fenomena ini sangat relevan dengan realitas di Provinsi

Kepulauan Riau, di mana arus penanaman modal mayoritas terkonsentrasi pada industri manufaktur, pengelolaan kawasan industri, industri galangan kapal, serta sektor-sektor sejenis yang bersifat padat modal (*capital-intensive*). Orientasi semacam ini pada akhirnya memicu ketimpangan struktural; alokasi investasi terbukti sukses melipatgandakan utilitas produksi, namun sangat terbatas dalam mengakomodasi tenaga kerja manusia. Sebagai konsekuensinya, lonjakan angka realisasi penanaman modal di wilayah ini tidak selalu berkorelasi linier dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sebagai variabel independen terakhir, regulasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) turut diestimasi memegang peranan dalam membentuk ekuilibrium pasar kerja. Pada prinsipnya, standardisasi batas bawah upah ini diimplementasikan guna mengangkat taraf hidup pekerja. Kendati demikian, melalui lensa ekonomi ketenagakerjaan, kebijakan tersebut secara simultan berpotensi mendistorsi preferensi perusahaan dalam proses rekrutmen. Terlebih pada wilayah dengan basis sektor manufaktur yang dominan, eskalasi UMK akan berimplikasi langsung pada pembengkakan ongkos produksi (*cost of production*). Merespons tekanan biaya tersebut, entitas bisnis umumnya akan melakukan rasionalisasi dengan membatasi serapan tenaga kerja atau menyubstitusi peran manusia melalui mekanisasi teknologi. Akibatnya, korelasi antara penetapan UMK dan fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mempresentasikan pola yang tunggal maupun linier, melainkan sangat terikat pada spesifikasi dan fundamental ekonomi di masing-masing daerah.

Berpijak pada rentetan argumentasi di atas, konstelasi hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, serta regulasi Upah Minimum terhadap fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau menyajikan sebuah celah penelitian (*research gap*) yang sangat krusial untuk diinvestigasi. Dalam lanskap teoretis, perbaikan mutu modal manusia, akselerasi laju ekonomi, masifnya penanaman modal, dan kebijakan pengupahan diidealkan sebagai instrumen utama untuk mengeskalasi serapan pasar kerja guna mereduksi angka pengangguran. Kendati demikian, fakta empiris di lapangan justru memunculkan anomali; di mana entitas wilayah dengan

agregat pertumbuhan dan investasi yang superior tidak serta-merta mencatatkan rasio pengangguran yang minim. Mengingat tingginya disparitas struktural perekonomian antar-kabupaten dan kota di wilayah ini, efek kausalitas dari setiap variabel independen tersebut terhadap TPT diproyeksikan akan sangat bervariasi. Oleh karenanya, arah korelasi maupun besaran signifikansi dari keempat variabel makroekonomi ini tidak dapat sekadar disimpulkan melalui asumsi teoretis semata, melainkan menuntut adanya pembuktian empiris yang komprehensif.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Saputri, S., & Yefriza. (2025) meneliti tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2018-2022 dengan variabel upah minimum, IPM, dan jumlah penduduk. Sementara itu, Munawaroh, S. R., Endang, E., Susilo, J. H., & Astuti, H. (2025) menganalisis IPM, pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap pengangguran di Indonesia menggunakan data panel dinamis dengan metode *Generalized Method of Moments* (GMM), sedangkan Anggraini, D., Sudharyati, N., Putra, R. A., Ramdhan, N., Putra, M. I. N., & Putra, H. H. (2023). (2023) menemukan hasil yang berbeda mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap TPT di Provinsi Jambi. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengembangkan kajian sebelumnya dengan menggunakan kombinasi IPM, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi variabel, periode, wilayah, dan pendekatan analisis dibandingkan penelitian terdahulu.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020-2024.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota secara parsial terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024?

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menjadi tambahan rujukan empiris yang dapat memperkaya kajian mengenai pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan UMK terhadap TPT.
2. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait ketenagakerjaan daerah.
3. Memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.
4. Menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
5. Menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan Investasi daerah.
6. Mendukung evaluasi kebijakan pembangunan terkait penurunan TPT.
7. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pengangguran daerah.
8. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas sumber daya manusia.